

Strategi Diskominfo DIY dalam Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat melalui Pengembangan Komunitas Informasi Masyarakat

Maritza Nuraida Putri*, Gerry Katon Mahendra

Administrasi Publik, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Jalan Ringroad Barat No.63, Nogotirto,
Gamping Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55592

*maritza29putri@gmail.com, gerrykaton@unisayogya.ac.id

Article History:

Received	: 29/04/2026
Received in revised form	: 29/06/2026
Accepted	: 10/07/2026

Abstract: This study aims to identify the strategy of the Communication and Information Office (Diskominfo) of the Special Region of Yogyakarta (DIY) in improving community digital literacy through the development of Community Information Groups (KIM). Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, in-depth interviews with 12 informants, and documentation, analyzed using the Miles and Huberman model. The analytical framework applies Jack Kooten's (1991) four-indicator strategy typology integrated with digital literacy theory (Naufal, 2021; Hague, 2010). Findings show that organizational and program strategies are well implemented with measurable behavioral changes among KIM members. However, the resource support strategy faces significant inter-regional budget disparities, and the institutional strategy has not been fully realized at the sub-district level. Supporting factors include Permenkominfo No. 4/2024, member volunteerism, and cross-institutional collaboration. Inhibiting factors include budget inequality, digital competency gaps among elderly members, and low public awareness of KIM.

Keywords: Strategy; Digital Literacy; Community Information Groups; Diskominfo DIY.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan literasi digital masyarakat melalui pengembangan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 12 informan, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Kerangka analisis mengacu pada teori tipe strategi Jack Kooten (1991) yang mencakup empat indikator, dikaitkan dengan teori literasi digital (Naufal, 2021; Hague, 2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi organisasi dan program telah berjalan baik dengan dampak nyata pada literasi digital anggota KIM. Namun, strategi pendukung sumber daya menghadapi ketimpangan anggaran antarkabupaten, dan strategi kelembagaan belum merata di tingkat kapanewon. Faktor pendukung meliputi Permenkominfo No. 4 Tahun 2024, semangat relawan KIM, dan kolaborasi lintas lembaga. Faktor penghambat meliputi ketimpangan anggaran, kesenjangan kompetensi digital anggota KIM lanjut usia, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap KIM.

Kata kunci: Strategi; Literasi Digital; Komunitas Informasi Masyarakat; Diskominfo DIY.

PENDAHULUAN

Teknologi digital telah berkembang cukup pesat di era saat ini yang dapat membawa perubahan besar terhadap aspek kehidupan masyarakat. Menurut Data Reportal, pada bulan Oktober 2024 pengguna internet di dunia mencapai 5,52 miliar (GoodStats., 2024a). Di Indonesia (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024) mencatat pengguna internet di Indonesia diperkirakan mencapai 221,56 atau 79,5% dari populasi 278.696.200 jiwa. Adapun indeks masyarakat digital Indonesia naik menjadi 43,18 dari sebelumnya 37,80 pada tahun 2022 (GoodStats., 2024b).

Dalam indeks literasi digital, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berada di peringkat tinggi nasional dengan keseluruhan penggunaan internet maupun media sosial sebesar 3,71 (skala 1-5). Namun, 45-55% masyarakat menghadapi masalah seperti kurangnya keterampilan digital (Katadata, 2023). Maka dari itu, perlu adanya literasi digital sebagai kemampuan masyarakat dalam mengelola informasi dengan bijak (Naufal, 2021; Sienkiewicz-Małyjurek & Zyzak, 2025). Menurut Hague (2010), literasi digital adalah kemampuan seseorang memanfaatkan teknologi digital untuk mengoperasikan suatu perangkat berbasis teknologi informasi, komunikasi, serta mampu untuk berkomunikasi secara efektif (Ummah & Kurniawan, 2020).

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY (Diskominfo DIY) memiliki peran dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik di DIY. Meskipun indeks literasi digital DIY menempati posisi tinggi secara nasional, dalam Rencana Strategis Diskominfo DIY Tahun 2022-2027 disebutkan adanya ketimpangan literasi digital antara masyarakat Kota dengan masyarakat Desa. Dalam hal ini, Pemerintah DIY memiliki wewenang untuk membuat suatu program khusus dalam meningkatkan literasi digital khususnya di daerah Pedesaan (Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2022).

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2024, nilai keterampilan digital Kabupaten/Kota di DIY menunjukkan variasi yang cukup signifikan yaitu Kota Yogyakarta menempati posisi tertinggi (63,82), diikuti Kabupaten Bantul (60,48), Kabupaten Kulon Progo (58,05), Kabupaten Sleman (56,16), dan Kabupaten Gunung Kidul (45,89). Data tersebut mempertegas adanya kesenjangan literasi digital antara wilayah

perkotaan dan pedesaan di DIY (Djatkiko et al., 2025). Salah satu program yang dirancang adalah dengan dibentuknya Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).



Gambar 1. Jumlah Keterampilan Digital Per Kabupaten di DIY Tahun 2024
Sumber : Indeks Masyarakat Digital Indonesia, 2024

Salah satu landasan hukum sebagai acuan dibentuknya KIM yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Namun, per-tahun 2024 KIM telah berubah menjadi Komunitas Informasi Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 yang menyebutkan KIM adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mengelola dan menyebarkan informasi serta memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah.

Menurut PPID Kementerian Komunikasi dan Digital RI, berdasarkan jawaban atas Permohonan Informasi Nomor 09/PPID/KOMDIGI/PI/03/2026 yang diajukan oleh penulis kepada PPID Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Pemerintah memperluas peran Kelompok Informasi Masyarakat menjadi Komunitas Informasi Masyarakat dengan alasan untuk menunjukkan bahwa peran KIM dapat lebih luas dalam melibatkan unsur masyarakat, mulai dari pelaku usaha maupun UMKM, tidak hanya fokus pada diseminasi informasi, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi berbasis digital (Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2026). Dalam hal ini, pengembangan KIM sangat diperlukan.

Tabel 1. Jumlah KIM Per Kabupaten/Kota Tahun 2024 sampai awal Tahun 2025

No	Wilayah	Jumlah KIM aktif
----	---------	------------------

1.	Bantul	28
2.	Kulon Progo	10
3.	Gunung Kidul	50
4.	Sleman	45
5.	Kota Yogyakarta	3
Total KIM di DIY		136 KIM

Summber: Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025

Dalam wawancara pra survei yang dilakukan oleh penulis, saat ini tercatat sekitar 1.562 KIM telah terbentuk namun, hanya sekitar 136 jumlah KIM yang aktif dan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di DIY. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, jumlah KIM aktif tertinggi terdapat di Kabupaten Gunung Kidul (50 KIM), diikuti Kabupaten Sleman (45 KIM), Bantul (28 KIM), Kulon Progo (10 KIM), dan Kota Yogyakarta (3 KIM). Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana strategi Diskominfo DIY meningkatkan literasi digital melalui pengembangan KIM? (2) Apa faktor pendukung dan penghambatnya?. Sedangkan tujuannya adalah mengetahui strategi yang dilakukan, menganalisis faktor pendukung dan penghambat, serta memberikan rekomendasi perbaikan strategi.

Penelitian terdahulu yang selaras antara lain dilakukan oleh (Aziz, 2023) tentang strategi peningkatan literasi digital menggunakan Google Dokumen, (Widianti, 2021) tentang strategi peningkatan literasi digital dalam pembelajaran matematika, (Ismayani, 2021) tentang penguatan literasi digital guru melalui Google Form, (Novitasari Wulandari, 2025) tentang strategi pengembangan KLA melalui forum OBAMA, dan (Rullah et al., 2025) tentang strategi komunikasi literasi digital bagi pemuda. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus strategi Diskominfo DIY dalam meningkatkan literasi digital melalui pengembangan KIM yang belum banyak dibahas sebelumnya.

Indikator utama yang digunakan adalah teori tipe strategi menurut Jack Kooten 1991 (dalam (Mudiono et al., 2023) yang membagi strategi menjadi empat tipe. Pertama, strategi organisasi (*corporate strategy*) yang berfokus pada visi, misi, tujuan, dan strategi baru. Kedua, strategi program (*program strategy*) yang berfokus pada pengaruh dari suatu program. Ketiga, strategi pendukung sumber daya (*resource support strategy*) yang berfokus pada memaksimalkan sumber

daya yang paling penting dalam peningkatan kinerja organisasi. Keempat, strategi kelembagaan (*institutional strategy*) yang berfokus pada pengembangan kinerja organisasi untuk menerapkan inisiatif strategi yakni dikaitkan dengan teori lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman yang mendalam terkait suatu permasalahan (Khaidir, 2022). Penelitian ini berlokasi di Diskominfo DIY yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Keparak, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Hasibuan et al., 2023). Observasi dilakukan secara non-partisipatif dengan mengamati kegiatan pembinaan KIM, pertemuan Forum KIM DIY, dan aktivitas produksi konten digital anggota KIM. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2026. Wawancara dilakukan dengan 12 informan yang terdiri dari Kepala Dinas Diskominfo DIY, Kepala Bidang IKP Diskominfo DIY, Kepala Bidang IKP/IKPS Diskominfo Kabupaten/Kota se-DIY, serta 5 perwakilan KIM dari masing-masing Kabupaten/Kota. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto, video, dan dokumen terkait kegiatan KIM. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara antar informan dari berbagai level pemerintahan dan anggota KIM. Analisis data menggunakan model menurut Miles dan Huberman dalam (Aeni, 2021) yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Organisasi (Corporate Strategy)

Secara spesifik, Pasal 23 Permenkominfo No. 4 Tahun 2024 mengatur bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi wajib melakukan pembinaan KIM mencakup penetapan arah kebijakan, koordinasi lintas level pemerintahan, serta evaluasi pelaksanaan program. Pasal ini menjadi dasar operasional strategi organisasi Diskominfo DIY karena memberi landasan hukum tentang siapa yang berperan sebagai pelaksana dan siapa yang menjadi sasaran pembinaan (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2024). Dalam hal

ini, strategi organisasi Diskominfo DIY dalam pengembangan KIM dapat dilihat berdasarkan bagaimana arah kebijakan tersebut dapat dijabarkan dalam program kerja yang dirancang setiap tahunnya. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 dijadikan sebagai landasan Diskominfo DIY dalam menjalankan pembinaan kepada KIM. Kepala Dinas Diskominfo DIY menyatakan bahwa:

"Pemda DIY hanya ada 1 visi misi yaitu visi dan misi Gubernur DIY Tahun 2022-2027. Yang ada di tingkat OPD adalah strategi. Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dalam meningkatkan literasi digital masyarakat berfokus pada terwujudnya masyarakat yang cerdas, kritis, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi" (Wawancara 20 April 2026).

Lebih lanjut, KIM dipilih sebagai instrumen strategis karena beroperasi langsung di tingkat Kelurahan/Kalurahan dan anggotanya merupakan warga setempat, selaras dengan konsep strategi organisasi Jack Kooten (Mudiono et al., 2023) dan teori Hamel-Prahalad (Setyaningrum, et al., 2022). Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Riries selaku Kepala Bidang IKP Diskominfo DIY:

"...Provinsi itu punya tugas untuk melakukan pembinaan. Jadi pada Kabupaten/Kota, termasuk dalam salah satu programnya adalah untuk pembinaan KIM. Kalau DIY ini, kami ada Forum KIM DIY. Jadi Forum KIM DIY barusan kemarin di akhir tahun 2025 ada pembaruan, karena kepengurusan yang lama habis. Jadi ada pembaruan kepengurusan untuk 4 tahun ke depan" (Wawancara 27 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Diskominfo DIY memiliki pembagian peran yang jelas, Diskominfo provinsi sebagai koordinator dan Diskominfo Kabupaten/Kota sebagai pelaksana. Hal ini selaras dengan indikator strategi organisasi menurut Jack Kooten 1991 dalam (Mudiono et al., 2023).

Bapak Agastya selaku Ketua Tim Kerja Pengelola Informasi Publik Diskominfo Sleman menyatakan bahwa:

"...Kami di Kabupaten memang sering berkoordinasi, berkolaborasi dengan Diskominfo DIY. Sesuai pedoman Komdigi terbaru, peran kita adalah mitra. Jadi KIM itu bukan kadonnya kominfo, bukan bawahannya kominfo, atau relawannya kominfo. Jadi kita mitra yang setara. Kami membutuhkan KIM dan KIM juga membutuhkan kami" (Wawancara 20 Februari 2026).

Posisi KIM sebagai mitra setara berbeda dari teori Jack Kooten yang menekankan struktur hierarkis (Mudiono et al., 2023), namun justru lebih selaras

dengan teori pengembangan masyarakat Twelvvetrees yang mendorong kemandirian warga (Afriansyah et al., 2023).



Gambar 2. Sekolah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2026

Pada tingkat Kabupaten, terlihat bagaimana Diskominfo Kabupaten/Kota dapat memahami terkait dengan arah kebijakan ini. Gambar 3 di atas menunjukkan salah satu bentuk pelaksanaan strategi organisasi Diskominfo DIY, yaitu Sekolah Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti oleh perwakilan KIM se-DIY sebagai upaya penguatan kapasitas kelembagaan. Sementara itu, KIM di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa adanya penyesuaian strategi dalam pengembangan dengan kondisi di wilayah Kota. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa di Kota, awalnya KIM dibentuk dengan berbasis Kelurahan namun, pada tahun 2025 terdapat adanya perubahan menjadi berbasis komunitas UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa KIM di Kota Yogyakarta memiliki fase awal dimana komunitas belum memiliki kapasitas dalam menentukan arahnya sendiri dan masih memerlukan fasilitas dukungan dari pemerintah.

Strategi Program (*Program Strategy*)

Kepala Dinas Diskominfo DIY menyatakan mengenai arah kebijakan program pengembangan KIM:

"Arah kebijakan terhadap pelaksanaan program pengembangan KIM umumnya menekankan pada penguatan peran KIM sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan informasi publik dan peningkatan literasi digital masyarakat. KIM diarahkan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengelola dan produsen informasi yang aktif, kreatif, serta bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya" (Wawancara 20 April 2026).

Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa program-program yang dirancang tidak hanya bersifat pembinaan satu arah dari pemerintah, tetapi juga mendorong KIM menjadi produsen informasi yang aktif. Hal ini selaras dengan konsep strategi program Jack Kooten. Pentingnya strategi komunikasi publik yang interaktif dan inklusif juga dikuatkan oleh (Hidayat, 2026) yang menemukan bahwa kejelasan informasi, media digital, dan aksesibilitas merupakan dimensi utama yang menentukan efektivitas komunikasi pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Ibu Riries selaku Kepala Bidang IKP Diskominfo DIY menyatakan bahwa peningkatan kapasitas KIM dilakukan melalui pelatihan seperti jurnalistik, membuat konten, sosialisasi, pengenalan kanal aduan serta pertemuan dengan stakeholder. Dalam pernyataan tersebut telah dijelaskan bahwa program pelatihan ini telah dilaksanakan secara rutin di Kabupaten/Kota yang ada di DIY namun dengan intensitas yang beragam sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Pelatihan jurnalistik dan pembuatan konten secara langsung mengasah keterampilan fungsional dalam literasi digital. Hal ini selaras dengan teori menurut (Naufal, 2021) yaitu kemampuan teknis dalam penggunaan teknologi digital secara efektif.

Adapun pada tahun 2024-2025, Diskominfo Sleman telah melaksanakan bimbingan teknis bagi KIM sebanyak 7 kali namun bergantung dari usulan atau kebutuhan KIM itu sendiri. Bapak Agastya selaku Ketua Tim Kerja Pengelola Informasi Publik Diskominfo Sleman menyatakan bahwa:

"Bimtek ada, tapi bergantung pada usulan KIM itu sendiri, setiap tahun ada. Jadi bimteknya jurnalistik pernah, videografi pernah, setiap tahun ada. Tahun 2025 itu 7 kali, 2024 juga 7 kali tapi itu bergantung dari mereka yang mengusulkan" (Wawancara 20 Februari 2026).

Mekanisme bimtek berbasis usulan ini menunjukkan bahwa Diskominfo telah berhasil membangun sistem responsif. Dalam hal ini, mekanisme usulan dari KIM menunjukkan bahwa program yang dirancang menjawab kebutuhan nyata di lapangan dan menghasilkan pelaksanaan yang konsisten yakni 7 kali per tahun. Hal ini selaras dengan konsep strategi program Jack Kooten tentang pentingnya dampak nyata.

Pada tahun 2024-2025, terdapat sebuah program baru yang menjadi inovasi. Program tersebut adalah adanya pemberian honorarium bagi para anggota KIM

yang telah menulis artikel maupun berita. Dari hasil menulis tersebut akan dimuat dalam website jogjaprovo.go.id. Dalam hal ini, para anggota KIM memberikan respon positif terhadap adanya program honorarium tersebut. Program honorarium ini menunjukkan bahwa keberlanjutan KIM juga ditopang oleh insentif ekonomi. Bapak Suripto selaku Mantan Ketua Forum KIM DIY sekaligus perwakilan dari KIM Kabupaten Sleman menyatakan bahwa:

"...Di Sleman itu kita siapkan 60 Juta setahun, satu kali berita seket ewu potong pajak. Jadi begitu ada beritanya masuk sudah dapat. Itu yang mempengaruhi keberlanjutan KIM karena daya tarik ekonomi. Kegiatan masyarakat apa saja yang bisa berlanjut lama itu pasti kalau ada fungsi ekonomi disitu" (Wawancara 2 Februari 2026).



Gambar 3. KIM DSN Juara 1 Nasional Festival KIM Tahun 2024
Sumber : Website Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, 2024

Keberhasilan dalam program pembinaan KIM ini ditunjukkan dengan capaian sampai ke tingkat nasional. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4, KIM Dinamika Sinema Nusantara (DSN) dari Kalurahan Sardonoarjo, Kabupaten Sleman berhasil meraih juara 1 nasional pada Festival KIM tahun 2024 dengan memproduksi lebih dari 1000 berita yang ditulis setiap tahunnya.

Ibu Partini selaku perwakilan dari KIM Malangan Bantul juga menyatakan bahwa adanya perubahan perilaku dari yang awalnya langsung menyebarkan informasi menjadi harus menyaring informasi dahulu sebelum menyebarkannya. Hal ini selaras dengan indikator strategi program menurut Jack Kooten 1991 (Mudiono et al., 2023), hal ini terbukti dari perubahan perilaku nyata anggota KIM di lapangan. Perubahan perilaku ini juga didukung oleh faktor kemampuan berpikir secara kritis dalam literasi digital menurut (Naufal, 2021) mengenai program peningkatan literasi digital bagi masyarakat.

Sementara di Kota Yogyakarta, melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi dipilih sebagai cara dalam pengembangan program. Ibu Diyan selaku Staf Bidang IKP Diskominfo Kota Yogyakarta menyatakan bahwa pada tahun 2025, Diskominfo Kota Yogyakarta bekerjasama dengan UII untuk mengadakan pelatihan desain kemasan, fotografi, dan digital marketing.

Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy)

Kepala Dinas Diskominfo DIY menyikapi keterbatasan sumber daya dengan pendekatan adaptif, kolaboratif, dan berbasis prioritas, yaitu memandangnya sebagai tantangan yang perlu dikelola secara strategis, bukan sebagai hambatan utama. Pernyataan ini selaras dengan konsep manajemen strategis Ibrahim 2008 tentang kemampuan beradaptasi (Setyaningrum, et al., 2022).

Dalam hal SDM, tidak ada staf khusus yang menangani KIM karena semua merangkap banyak tugas. Bapak Didik selaku Kepala Bidang IKP Diskominfo Gunung Kidul menyatakan:

"SDM kita sedikit, karena pekerjaan kami juga tidak hanya melakukan kemitraan dengan KIM. Ada banyak sekali kegiatan sedangkan secara personil kami di bidang itu hanya ada 15 orang, 15 orang ini sudah terdistribusi pekerjaannya juga sehingga kami harus *me-manage* dengan baik dari ketersediaan SDM kami yang ada saat ini" (Wawancara 19 Februari 2026).

Staf baik di Diskominfo DIY dan Kabupaten/Kota tidak secara khusus menangani pembinaan KIM saja tetapi juga menangani tugas atau kegiatan lain. Kondisi ini kurang selaras dengan indikator strategi pendukung sumber daya menurut Jack Kooten 1991 (Mudiono et al., 2023), namun jika SDM yang ada masih membelah diri maka sumber daya tersebut dinilai belum optimal sepenuhnya. Diskominfo DIY saat ini berupaya mengoptimalkan SDM yang tersedia dengan mengembangkan kapasitas pembina KIM melalui pelatihan pendampingan. Kondisi ini senada dengan temuan (Anwar et al., 2026) yang menyimpulkan bahwa pengembangan kompetensi aparatur berbasis digital di tingkat pemerintah desa memerlukan program pelatihan yang berkelanjutan dan terstruktur untuk menopang pelayanan publik digital yang efektif.

Dalam ketersediaan anggaran, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Kabupaten/Kota. Bapak Suropto selaku Mantan Ketua Forum KIM DIY sekaligus perwakilan dari KIM Kabupaten Sleman menyatakan bahwa:

"Dari Kominfo Kabupaten itu kita siapkan 60 juta setahun untuk honorarium berita. Dulu 10 juta saja, sekarang sudah 60 Juta" (Wawancara 2 Februari 2026).

Sementara di Kabupaten Kulon Progo, anggaran untuk honorarium berita masih jauh lebih kecil. Bapak Zazin selaku perwakilan KIM Kulon Progo menyatakan bahwa di Kulon Progo baru bisa menganggarkan 1 Juta pertahun dengan memproduksi 35 berita. Ketimpangan ini selaras dengan strategi pendukung sumber daya Jack Kooten yang mengharapkan organisasi memaksimalkan sumber dayanya secara optimal (Mudiono et al., 2023). Adanya kebijakan pemerintah tahun 2025-2026 mengenai efisiensi anggaran juga membuat adanya tekanan terhadap ketersediaan anggaran cukup dirasakan. Bapak Arif selaku Kepala Bidang IKP Diskominfo Bantul menyatakan bahwa dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari pusat, kegiatan studi banding KIM terpaksa ditiadakan.

Dari sisi sumber daya teknologi, Diskominfo Bantul menyediakan 39 wifi publik gratis bagi para 53 KIM di Bantul. Penyediaan fasilitas ini selaras dengan indikator strategi pendukung sumber daya menurut Jack Kooten 1991 (Mudiono et al., 2023). Di Kabupaten Gunung Kidul, terdapat suatu program kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sekitar untuk mengatasi adanya keterbatasan infrastruktur digital. Bapak Sapswitono selaku Ketua Forum KIM DIY sekaligus perwakilan dari KIM Gunung Kidul menyatakan bahwa adanya kolaborasi antara KIM dan pemerintah dalam pembangunan tower setinggi 15 meter. Dalam hal ini sumber daya komunitas dimanfaatkan untuk melengkapi keterbatasan sumber daya pemerintah.

Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy)

Diskominfo DIY membentuk sistem koordinasi berjenjang dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota dan Padukuhan, dengan Forum KIM DIY sebagai penghubung antarlevel (Desmaryani et al., 2024). Salah satu sarana utama kelembagaan yang dibentuk oleh Diskominfo DIY adalah Forum KIM DIY. Fungsi penting dari adanya forum tersebut dijelaskan oleh Ibu Riries selaku Kepala Bidang IKP Diskominfo DIY:

"Kalau tidak ada forum KIM yang di level provinsi, mereka hanya akan terkotak di satu Kabupaten dan Kota. Tapi dengan adanya forum KIM di level provinsi ini maka informasi yang perlu disebar ke seluruh masyarakat DIY bisa

berjalan dengan lancar dan cepat. Forum KIM ini kami berharap bisa lebih lancar untuk penyampaian atau diseminasi informasinya kepada masyarakat" (Wawancara 27 Februari 2026).

Forum KIM DIY berfungsi sebagai mekanisme koordinasi vertikal antar level, selaras dengan strategi kelembagaan Jack Kooten (Mudiono et al., 2023). Pertemuan rutin diadakan bergilir antar Kabupaten/Kota.

Struktur kelembagaan mengenai KIM yang seharusnya juga digambarkan berjalan secara berjenjang. Bapak Suropto selaku Mantan Ketua Forum KIM DIY sekaligus perwakilan dari KIM Kabupaten Sleman menyatakan bahwa:

"Setiap Kalurahan itu membuat KIM, KIM Desa namanya. KIM Desa ada wartawannya, KIM Desa masuk forum KIM di Kapanewon. Nah Kapanewon nanti mengelola bagaimana. Jadi mulai dari KIM Desa, KIM Kapanewon, KIM Kabupaten, KIM Provinsi, KIM pusat, terstruktur" (Wawancara 2 Februari 2026).

Struktur berjenjang ini selaras dengan strategi kelembagaan Jack Kooten (Mudiono et al., 2023), namun belum terwujud merata karena tidak semua Kapanewon dan Kalurahan memiliki KIM aktif. Selain itu di Kota Yogyakarta, adanya keterlibatan Tim Diseminasi Informasi (TDI) dalam kepengurusan Forum KIM Provinsi DIY juga menjadi suatu bentuk kerjasama antar lembaga yang cukup menarik perhatian. Ibu Diyan selaku Staf Bidang IKP Diskominfo Kota Yogyakarta menyatakan bahwa:

"Memang KIM Provinsi, Dinas Komunikasi Provinsi, Diskominfo Provinsi memang sangat concern di program KIM ini. Terlihat dari teman-teman kami, rekan-rekan kami TDI ini yang menjadi tergabung dalam susunan kepengurusan. Waktu itu saya pernah membaca SK-nya itu memang tugasnya itu mendorong berkembangnya KIM di wilayah Provinsi DIY" (Wawancara 25 Februari 2026).

Keterlibatan TDI dalam Forum KIM DIY selaras dengan teori pengembangan masyarakat Twelvvetrees tentang sistem layanan sosial yang saling terhubung (Afriansyah et al., 2023). Selain koordinasi internal, Diskominfo DIY juga mengikutsertakan KIM dalam Festival KIM Nasional dan berhasil meraih nominasi stand terbaik di Jakarta pada tahun 2025, yang menunjukkan strategi kelembagaan yang berorientasi pada pengakuan di tingkat nasional, selaras dengan teori manajemen strategis Ibrahim 2008 (Setyaningrum, et al., 2022).

Faktor Pendukung dan Penghambat

Beberapa faktor pendukung dan penghambat mempengaruhi pelaksanaan strategi Diskominfo DIY dalam meningkatkan literasi digital masyarakat melalui pengembangan KIM. Faktor pendukung pertama adalah Permenkominfo No. 4 Tahun 2024 yang memberi landasan hukum jelas dan pedoman peran antarlevel pemerintahan (Naufal, 2021). Faktor pendukung kedua adalah semangat relawan anggota KIM yang bekerja ikhlas dan rela datang dengan biaya sendiri. Faktor pendukung ketiga adalah kemitraan lintas lembaga, Diskominfo Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan UII (pelatihan digital marketing) dan KIM Kulon Progo berkolaborasi dengan AKPRIND yang memperkuat kapasitas KIM melalui kolaborasi akademik (Qadourah, 2026).

Adapun untuk faktor penghambat pertama adalah efisiensi anggaran pemerintah pusat 2025–2026 yang dirasakan hampir semua Kabupaten/Kota di DIY. Faktor penghambat kedua adalah kesenjangan kompetensi digital anggota KIM antardaerah. Bapak Arif selaku Kepala Bidang IKP Diskominfo Bantul menyatakan mayoritas anggota KIM usianya sudah tua selaras dengan temuan (Sala & Kochergina, 2025). Faktor penghambat yang ketiga yaitu mengenai masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peran serta keberadaan KIM di masyarakat. Masyarakat cenderung lebih familiar terhadap komunitas seperti Karang Taruna.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Diskominfo DIY telah menjalankan strategi peningkatan literasi digital masyarakat melalui pengembangan KIM dengan mengacu pada teori strategi Jack Kooten (1991). Strategi organisasi berjalan baik melalui pembagian peran yang jelas antara provinsi dan kabupaten/kota, meskipun KIM lebih tepat diposisikan sebagai mitra setara sesuai pendekatan Twelvetreets (1991). Strategi program terbukti memberikan dampak nyata berupa perubahan perilaku anggota KIM dalam menyaring informasi serta capaian prestasi di tingkat nasional. Namun, strategi pendukung sumber daya menghadapi ketimpangan anggaran antarkabupaten yang cukup signifikan, sementara strategi kelembagaan belum terwujud merata di seluruh Kapanewon dan Kalurahan. Hambatan utama meliputi efisiensi anggaran,

kesenjangan kompetensi digital anggota KIM lanjut usia yang menjadi objek literasi alih-alih agen perubahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan KIM. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman implementasi strategi literasi digital berbasis komunitas di pemerintahan daerah. Penelitian lanjutan dapat membandingkan model pengembangan KIM antar provinsi atau mengukur dampak KIM terhadap peningkatan indeks literasi digital secara kuantitatif.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar Diskominfo DIY mendorong standarisasi minimal program pembinaan KIM antarkabupaten/kota, mengembangkan skema pembiayaan alternatif dari dana desa atau swasta, serta merancang program pelatihan yang disesuaikan dengan kelompok usia, khususnya bagi anggota KIM lanjut usia, agar mereka dapat bertransisi dari objek literasi digital menjadi agen perubahan yang efektif. Penelitian lanjutan dapat membandingkan efektivitas model pengembangan KIM antara provinsi atau mengukur dampak KIM terhadap peningkatan indeks literasi digital masyarakat secara kuantitatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Aeni, S. (2021). Peningkatan Pelayanan Administrasi Pendidikan melalui Inovasi Manajemen Budaya Organisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(2), 60–66. <https://doi.org/10.62388/jpdp.v1i2.8>
- Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Amruddin, Siswanto, D., Widiyawati, R., & Abdurrohman. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. PT Global Eksekutif Teknologi. ISBN: 978-623-198-033-5. <https://share.google/9yMXSIbPw56Ozl8Lj>
- Anwar, K., Sugiyanto, L., & Koesoemaningsih, R. (2026). Manajemen Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dalam Mendukung Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 8(1), 166–188. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v8i1.9920>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-%0Apengguna-internet-indonesia-tembus-%0A221-juta-orang>
- Aziz, S. (2023). Strategi Peningkatan Literasi Digital dalam Pembelajaran PABP dengan Menggunakan Google Dokumen. *Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar*, 7(3), 857–876. <https://doi.org/10.26811/didaktika.v7i3.570>

- Desmaryani, S., Soleh, A., Irmanelly, & Wiarta, I. (2024). Integration of technology acceptance models and government support to improve digital literacy. *Heliyon*, 10(14), e34086. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34086>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 2022-2027*. <https://diskominfo.jogjaprov.go.id/detail/59259fad-3c31-4e59-8bfd-da79e4bc25f6>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). *Jumlah KIM Per Kabupaten/Kota Tahun 2024 sampai awal Tahun 2025*.
- Djarmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S. (2025). Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance. *Sustainability (Switzerland)*, 17(7), 1–28. <https://doi.org/10.3390/su17072908>
- Fauzi, A., Mulawarman, W. G., & Warman, W. (2024). Peran Kebijakan Pemerintah Dalam Memfasilitasi Penggunaan Media Siber Untuk Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat Di Kalimantan Timur. *Jurnal Basataka (JBT)*, 7(2), 899–909. <https://doi.org/10.36277/basataka.v7i2.570>
- GoodStats. (2024a). *Simak perkembangan pengguna internet dunia selama 10 tahun terakhir*. <https://goodstats.id/article/simak-%0Aperkembangan-pengguna-internet-dunia-%0A selama-10-tahun-terakhir-Gclqd>
- GoodStats. (2024b). *Skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia capai 43,34 di 2024*. <https://data.goodstats.id/statistic/survei-%0Akominfo-skor-indeks-masyarakat-digital-%0AIndonesia-capai-4334-di-2024-IVOI1>
- Hasibuan, M. P., Azmi, R., Arjuna, D. B., & Rahayu, S. U. (2023). Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi. *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 8–15. <https://doi.org/10.55537/gabdimas.v1i1.582>
- Hidayat, F. (2026). Efektivitas Strategi Komunikasi Publik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Program Pemerintah Daerah Pada Era Digital Di Kota Medan. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 8(1), 47–58. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v8i1.9043>
- Ismayani, R. M. (2021). *Strategi Penguatan Pendidikan Literasi Digital Guru Smp Dalam Penyusunan Soal Daring Berbantuan Google Form R*. 167–186. <https://share.google/HMyhIElpfMoTmDExb>
- Katadata. (2023). *Status Literasi Digital di Indonesia 2023*. https://cdn1.katadata.co.id/media/Report_%0ALITDIG_2023.pdf
- Kementerian Komunikasi dan Digital RI. (2026). *Pemberitahuan Tertulis tanggal 7 April 2026 atas permohonan informasi nomor 09/PPID/KOMDIGI/PI/03/2026*. PPID Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika*. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/691/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+8+tahun+2019+tanggal+9+september+2019
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/29933>
- Khaidir, A. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Number March). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>

- Mudiono, M., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). Strategi Peningkatan Kualitas Dan Kinerja Penyelenggara Jalan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. *Ji@P*, 12(2). <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.8966>
- Naufal, H. A. (2021). Literasi Digital. *Perspektif*, 1(2), 195–202. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.32>
- Novitasari Wulandari, E. S. (2025). Strategi DPMP4KB Dalam Pengembangan KLA melalui Forum OBAMA di Kota Magelang. *Ilmu Administrasi Negara*, 7(Juli), 64–81. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1198>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. (2024). *KIM Dinamika Sinema Nusantara Kalurahan Sardono Harjo Raih Apresiasi KIM Terbaik Kategori UMKM dalam Festival KIM 2024*. <https://slemankab.go.id/kim-dinamika-sinema-nusantara-kalurahan-sardonoharjo-raih-apresiasi-kim-terbaik-kategori-umkm-dalam-festival-kim-2024-2/>
- Qadourah, J. A. (2026). Socio-Economic and cultural readiness for digital participatory planning: Stakeholder insights from Jordan. *Results in Engineering*, 29(October 2025), 108875. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.108875>
- Rullah, A. D., Silva, F. R., Pratama, E. T. H., & Purwanto, E. (2025). Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Literasi Digital di Kalangan Pemuda. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.47134/jpem.v2i1.568>
- Sala, E., & Kochergina, E. (2025). Is E-government an opportunity for all? Identifying barriers and enablers of E-government use among older adults in Europe. *Social Sciences and Humanities Open*, 12(March), 102158. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102158>
- Setyaningrum, R. P., Soelistya, D., Desembrianita, E., Noor, A., & Salamah, U. (2022). EVALUASI KINERJA. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. <https://share.google/OSVAzCkT4ICFrCHfL>
- Sienkiewicz-Małyjurek, K., & Zyzak, B. (2025). Digital Technologies in Public Administration Networks: Systematic Literature Review and Research Avenues. *Administration and Society*, 57(8–9), 1051–1087. <https://doi.org/10.1177/00953997251369090>
- Ummah, A. H., & Kurniawan, A. (2020). Literasi Digital Dan Peran Strategis Net Generation Dalam Membangun Konten Positif Di Media Sosial. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 4(2), 170. <https://doi.org/10.36841/integritas.v4i2.558>
- Widianti, H. (2021). Strategi Peningkatan Literasi Digital dalam Pembelajaran Matematika (Studi Kasus Peserta Didik di SMAN 1 Kertosono Kab. Nganjuk). *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 20(1), 101–114. <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/441>